

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2013, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Setyo Wahyudi, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- David Berry, 1983, *Pokok-Pokok Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali.
- Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers and Anthony Lavers, 2009, *FIDIC CONTRACTS: LAW AND PRACTICE*, London and Newyork : Routledge Taylor & Francis Group.
- Endrik Saifudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Evy Lusya Ekawati, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, Studi Kasus: Penyelesaian Tunggakan Listrik Antar Pelanggan Dengan Perusahaan Listrik Negara*, Yogyakarta : Genta Press.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Gunarso, Yulia Singgih D, 2000, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta: BPK Gunung Agung.
- H, Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha*

Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jhony Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi.

Kansil, C.S.T, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Adiguna Bimasakti, 2021, *Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah*, Makasar : Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolut Media.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roby Irawan, dkk, 2016, *Studi Perbandingan Standar Dan Prosedur Dokumen Kontrak Fidic Dengan Standar Menteri Pekerjaan Umum*, Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura.

Safri Nugraha, dkk., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

_____, 2013, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.

_____, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Grafindo

_____, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali

Pers.

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang.
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Suratman dan Philips Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press.
- Tim MaPPI-FHUI, "Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia". Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,
- Winahyu Erwiningsih, 2006, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Zaenal Arifin, 2008, *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi 4, Jakarta: Grasindo,
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Endah Cahyani, 2022, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta : Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 3, Issue. 2.
- Hervin Yoki Pradikta dan Agita Juliana, 2024, *Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung : Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2.
- Philipus M. Hadjon, T. S. D., 2005 *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)*, Langkah-langkah Legal Problem

Solving dan Penyusunan Legal Opinion, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, dalam Danel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia Of Jurnal, Vol. 5, No.4, Edisi 1.

Rodliyah, dkk, 2019, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Mataram : Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4 No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Surat Edaran Jamdatun Nomor: SE-010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (SE Pertimbangan Hukum).

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (SE JAMDATUN) Nomor SE-02/G/Gs.2/04/2020 Tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat.

Surat Keputusan Kejaksaan RI No. SK: KEP-I-11/P.1.20/Cp.1/08/2024 tentang Standar Pelayanan Pendampingan Hukum

D. SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Adi Kadir, 2019, *Tesis: Kedudukan TP4D Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Universitas Airlangga.

Bambang Suheryadi, 2022, *Disertasi: Kewenangan Kejaksaan RI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Universitas Airlangga.

Endah Cahyani, 2022, *Tesis : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Universitas Indonesia.

Mulyadi Ngadiyo, 2022, *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sebagai Kuasa Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 487/K/TUN/2020)*, Universitas Islam Riau.

Nopri Exandi, 2022, *Tesis: Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih*, Universitas Sriwijaya.

Yandi Mustiqa, 2020, *Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Di Kota Solok Sumatera Barat*, Padang : Universitas Andalas.

E. LAIN-LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : 1990.

Dona Raisa Monica, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Katalog Elektronik (E-Purchasing)*, [Http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/ Pidana/Article/View/1206](http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Pidana/Article/View/1206).

Yusuf Akbar Amin, *Pendampingan Hukum*, <https://datun.kejarigianyar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>.